

MEMOTRET KETERLIBATAN BPPM PESANTREN MASLAKUL HUDA KAJEN DALAM AKSI PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Zubaedi

Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga

Abstract

This paper describes the activities of The Community Development and *Pesantren* Bureau (BPPM) of The Pesantren Maslakul Huda (PMH) in developing society. The BPPM PMH was established in 1980 and it was considered as a "The *Pesantren* NGO" whose programs are dominated by income regenerating program for developing rural society and it still receives a positive welcome from society.

BPPM PMH uses development from within approach or empowerment at the grassroots approach and bets on the strong strategy (the action is like total football and it performs programs) to make people help themselves. The types of programs of developing society which was implemented by BPPM PMH include sanitation, information of education and communication, promoted the the small-scale industry through a variety of skill training, workshop and entrepreneurship development, funding program for informal sectors and woman program and other developments programs. The social development program performed by BPPM PMH produces a positive effect on the target group life especially in participating their physiological, mental, cultural, social and economic life.

I. Pendahuluan

Perkembangan LSM sebagai gerakan sosial terorganisir (*organized social movement*) di Indonesia sejak tahun 1970 sangatlah mengesankan jika

ditinjau dari segi jumlah, keragaman serta letak geografisnya.¹ Jika pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an hanya sedikit gerakan sosial dan kelompok non pemerintah yang secara aktif memiliki kepedulian dan kemampuan untuk menangani masalah-masalah pembangunan, kini keadaan tersebut sudah jauh berubah yang ditandai dengan berdirinya ribuan LSM.

Dari sekian LSM yang berkiprah dalam aksi pengembangan masyarakat di tanah air terdapat tipologi LSM yang dibentuk di lingkungan pesantren dengan melibatkan kiai serta sejumlah santri sebagai tulang punggung organisasi. Salah satu di antaranya adalah Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM) Pesantren Maslakul Huda (PMH) Kajen Margoyoso Pati, sebuah LSM "Pesantren" yang didirikan oleh Kiai MA Sahal Mahfudh dan para santri seniornya.²

II. Ide Pengembangan Masyarakat

Suksesnya pembentukan BPPM di lingkungan Pesantren Maslakul Huda Kajen terutama berkat keterbukaan pemikiran dan keluasan pandangan Kiai Sahal dalam memaknai *dakwah Islamiyah*. Baginya, *dakwah Islamiyah* tidak harus selalu diterjemahkan dengan *dakwah bil-lisan/dakwah bil-maqal* atau *mimbariyah*, namun dakwah yang paling mendasar dan mendesak justeru berupa aksi-aksi atau program nyata yang langsung menyentuh kebutuhan atau sering disebut *dakwah bil-hal*.³

Berangkat dari pemikiran tersebut Kiai Sahal Mahfudh berani dan mau memperluas bidang dakwah pesantren dengan program pengembangan masyarakat.⁴ Dalam pandangan Kiai Sahal, aksi pengembangan atau pembangunan masyarakat secara sistematis dan terorganisir melalui BPPM Pesantren Maslakul Huda Kajen (BPPM PMH) merupakan implementasi dari *amar ma'ruf nahi munkar* (QS. Ali Imran 110) sekaligus sebagai bagian dari *dakwah bil-hal* atau dakwah lewat amal perbuatan nyata. Lewat aksi pengembangan masyarakat maka pesantren telah menerjemahkan nilai-

¹Mansour Fakih, *Pergolakan Ideologi di Dunia LSM Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), p. 4.

²Di antara santri senior yang menjadi tulang punggung BPPM Pesantren Maslakul Huda adalah Drs. Abdul Wahib, Ahmad Sofwan dan Hartono.

³KH MA Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 2003, Cet. II), p. 119.

⁴M. Dawam Rahardjo, *Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun Dari Bawu*, (Jakarta: P3M, 1985), p. 216.

nilai agama dalam rangka membantu memecahkan berbagai permasalahan hidup dan kehidupan masyarakat.

Dengan demikian gagasan pembentukan BPPM Pesantren Maslakul Huda merupakan bentuk dari kontekstualisasi pemaknaan *fardhu kifayah*. Sebagaimana dikerangkakan Kiai Sahal, *fardhu kifayah* sebaiknya dipahami secara aktif, positif dan proporsional. *Fardhu kifayah* hendaknya tidak definisikan secara sempit yakni sebuah kewajiban keagamaan yang gugur jika sudah dikerjakan oleh sebagian orang, namun semuanya berdosa jika tak satupun yang melaksanakannya seperti kewajiban shalat jenazah. Sebaiknya kita menggunakan definisi *fardhu kifayah* sebagaimana dikatakan Imam Rafi'i yaitu kewajiban yang berkaitan dengan kemaslahatan umum baik yang bersifat keagamaan (keakhiran) maupun yang bersifat keduniawan yang pelaksanaannya menjamin kebaikan hidup bersama. Upaya mengatasi kemiskinan, pemenuhan kebutuhan sandang pangan (karena tak tertanggulangi oleh zakat dan baitul mal), pemeliharaan kesehatan, kontrol sosial, pendidikan dan pengajaran, penyuluhan serta upaya-upaya lain untuk mencerdaskan bangsa.

Kalau demikian, inti ajaran *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif) sebenarnya menyangkut aspek kemasyarakatan yang lingkupnya jauh lebih luas dan kompleks. Sasaran utama doktrin *fardhu kifayah* adalah terbentuknya tatanan sosial-masyarakat yang aman, tertib, adil, makmur serta terhapusnya semua penyakit sosial seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan berbagai tindak pelanggaran hukum lainnya. Untuk mewujudkan keinginan itu memerlukan program dakwah secara terorganisir, terencana, terkoordinasi dan terevaluasi.⁵ Dakwah model ini tidak lain adalah program pengembangan seperti ditangani oleh BPPM Pesantren Maslakul Huda.

Dengan eksistensi BPPM, Pesantren Maslakul Huda bermaksud meredefinisikan dan memperluas peran-peran tradisional pesantren yang selama ini terbatas sebagai makelar budaya hingga akhirnya mau menyentuh menggarap dimensi kebutuhan pragmatis masyarakat. Upaya perluasan fungsi pesantren ini sebenarnya selaras dengan tujuan didirikannya pesantren secara umum, yaitu menyiapkan manusia yang lebih bertaqwa kepada Allah dan mampu mewarisi bumi ini dalam arti mengelola, memanfaatkan, menyeimbangkan dan melestarikan kehidupan dengan tujuan

⁵KH MA Sahal Mahfudh, "Dakwah dan Pengembangan Masyarakat", *Makalah disampaikan pada Lokakarya GP Ansor di Pesantren Al-Masturiyyah Cisaat Sukabumi 30 Desember 1986.*

akhir untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.⁶ Sebagaimana dirumuskan KH. M.A. Sahal Mahfudh, pesantren bertugas untuk mendidik para santri agar menjadi santri yang mampu melakukan 'ibâdatullâh secara benar dan taat, serta mempersiapkan para santri yang mampu 'immârat al-ardl (memakmurkan bumi). Jadi fungsi 'ibâdatullâh dan 'immârat al-ardl inilah yang ingin dijangkau oleh Pesantren Maslakul Huda lewat BPPM-nya.

Bagi Pesantren Maslakul Huda, kehadiran Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM) tersebut sebagai langkah kontekstualisasi pemikiran ajaran Islam dengan realitas masyarakat.⁷ Pemahaman ajaran Islam tersebut kemudian diintroduksir kepada masyarakat yang relevan dengan permasalahan, kemampuan, kebutuhan mereka. Sesuai tuntutan modernisasi, pesantren diharapkan tidak hanya memainkan fungsi-fungsi tradisionalnya yakni: *pertama*, transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam; *kedua*, pemeliharaan tradisi Islam; dan *ketiga*, reproduksi ulama. Sebaliknya peranannya harus diperluas dengan merespon tuntutan masyarakat modern yang tengah gencar-gencarnya membangun di berbagai bidang sehingga pesantren diharapkan menjadi alternatif pembangunan yang berpusat pada masyarakat itu sendiri (*people-centered development*) dan sekaligus sebagai pusat pengembangan pembangunan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented development*).⁸

Pada konteks ini, pembaharuan perlu dilakukan untuk refungsionalisasi pesantren sehingga peranannya lebih mengarah sebagai pelaku penting dalam pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Ia perlu menempatkan dirinya sebagai institusi dinamisator dan katalisator pembangunan masyarakat desa bukan hanya di bidang keagamaan, namun juga di bidang-bidang kehidupan sosial lainnya. Gejala tumbuhnya minat pesantren untuk mengembangkan program kemasyarakatan secara sederhana dapat diklasifikasikan dalam dua bagian. *Pertama*, program kemasyarakatan, yang tumbuh dan dikembangkan oleh inisiatif pihak pesantren sendiri, dan *kedua*, adalah pendekatan program kemasyarakatan yang dikembangkan atas

⁶Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), p. 44.

⁷Kiai Sahal dianggap sebagai salah satu tokoh pesantren yang berhasil melakukan pergeseran dalam memandang fiqh, yakni dari fiqh sebagai paradigma "kebenaran ortodoksi" menjadi paradigma "pemaknaan sosial". Baca Ahmad Baso, "Melawan Tekanan Agama: Wacana Baru Pemikiran Fikih NU" dalam *Wacana Baru Fiqih Sosial 70 Tahun KH. Ali Yafie*, (Bandung: Mizan, 1997), p. 137.

⁸Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, (Jakarta: Logos, 1999), p. 105.

suatu kerjasama dengan pihak luar.⁹

Sementara secara sosiologis, kehadiran BPPM Pesantren Maslakul Huda adalah respon cerdas komunitas Pesantren Maslakul Huda pada saat itu dalam membaca ketimpangan lingkungannya. Dilihat dari struktur sosial-ekonomi, lingkungan Desa Kajen dan sekitarnya yang menjadi setting pembentukan BPPM Pesantren Maslakul Huda ditandai oleh karakteristik kehidupan sosial ekonomi yang belum berkembang. Di desa ini tidak tersedia lahan pertanian dan perkebunan luas serta dijejeri penduduk miskin yang sebagian besar berprofesi sebagai pengrajin krupuk *tayammum*. Mencermati kondisi sosial ekonomi di Kajen dan sekitarnya ini, para kyai dengan dimotori Kyai Sahal Mahfudh menilainya sebagai potensi besar yang memerlukan pembinaan lebih lanjut melalui pendidikan keagamaan sekaligus program pengembangan masyarakat. Pada saat itu, Kyai Sahal berpendapat bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan juga dapat berperan memajukan desa. Menurutnya, pesantren tidak hanya dapat mewarnai, lebih dari itu sanggup membentuk masyarakat.¹⁰ Melalui asumsi itu, Kyai Sahal berpendapat bahwa orientasi pesantren harus semakin luas, tidak saja dalam soal pendidikan agama, melainkan juga dalam soal pendidikan masyarakat dalam arti luas. Untuk merealisasi gagasan tersebut, Kyai Sahal mengajak seluruh pengasuh Pondok Pesantren melihat persoalan nyata dan kebutuhan dasar masyarakat serta menjajagi apa sebetulnya yang menjadi harapan-harapan mereka serta membangkitkan kesadaran dan kemampuan sendiri untuk memperbaiki taraf hidupnya.

Dengan kata lain, pesantren perlu mengambil peran dalam pengembangan masyarakat. Upaya pengembangan masyarakat ini dapat dilakukan dengan tiga aktifitas.¹¹ Pertama, berupaya membebaskan dan menyadarkan masyarakat. Kegiatan ini bersifat subyektif dan memihak kepada masyarakat tertindas (*dhuafa*) dalam rangka memfasilitasi mereka dalam mencapai suatu proses penyadaran sehingga memungkinkan lahirnya upaya untuk pembebasan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Kedua, ia menggerakan partisipasi dan etos swadaya masyarakat. Pesantren perlu menciptakan suasana dan kesempatan yang memungkinkan masyarakat mengidentifikasi masalah mereka sendiri, merumuskan tujuan pengembangan

⁹Manfred Open dan Wolfgang Karcher, *Dinamika Pesantren*, (Jakarta: P3M, 1988), p. 92-93.

¹⁰K.H.M.A. Sahal Mahfudh, "Membangun Harus dari Bawah", dalam *Prisma*, (Jakarta: LP3ES, No. 3 Maret 1979, Tahun VIII), p. 46.

¹¹Manfred Open,...*op.cit.*, p. 150.

kualitas hidup mereka sendiri, menjadi pelaksana program sendiri, melakukan evaluasi, menindak-lanjuti serta menikmati hasilnya sendiri. *Ketiga*, pesantren mendidik dan menciptakan pengetahuan. *Keempat*, pesantren memelopori cara mendekati masalah secara benar sehingga masyarakat mengetahui kebutuhan riilnya (*real need*). Jadi masyarakat pada konteks ini dididik untuk mampu mengintegrasikan antara penelitian dengan aksi-aksi konkret yang melibatkan elemen masyarakat sebagai pelaku utamanya.

Peran baru yang menuntut kerja profesional ini tampaknya tidak canggung untuk dilaksanakan pesantren lantaran mereka telah memiliki potensi yang mendukung ke arah itu. Posisi pesantren yang berada di antara dua "dunia" yakni dunia pedesaan dan dunia luar sangat memungkinkannya menjadi *cultural broker* (lembaga perantara).

III. Aksi-Aksi Pengembangan Masyarakat

Paparan sebelumnya telah menjelaskan bahwa sejak awal KH. Sahal punya gagasan untuk meningkatkan peran dan fungsi pesantren yang semula berjalan apa adanya, tak terprogram dan lebih banyak menunggu menjadi sebuah lembaga yang memiliki program terorganisir sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan zaman, baik dalam fungsinya sebagai lembaga pendidikan maupun sebagai lembaga sosial kemasyarakatan. Untuk merealisasikan gagasannya tersebut, KH. M.A. Sahal Mahfudh pada tahun 1977 mengikutsertakan dua santri seniornya untuk mengikuti Latihan Tenaga Pengembangan Masyarakat (LTPM) yang diselenggarakan oleh LP3ES Jakarta bekerjasama dengan Departemen Agama RI selama enam bulan di kelas mendapatkan teori-teori dan enam bulan praktik lapangan di pesantren masing-masing.¹²

¹²Gagasan pengembangan masyarakat melalui pesantren semula diperkenalkan dan didialogkan terlebih dahulu dengan beberapa kyai pengasuh pesantren yang diperkirakan memenuhi kriteria : memiliki sifat keterbukaan pesantren, memiliki daya pengaruh terhadap pesantren lain, dan memiliki daya pengaruh terhadap masyarakat sekitar. Dari hasil perkenalan dan dialog itu, ada enam pesantren yang mencoba merintis program pengembangan masyarakat melalui pesantren. Keenam pesantren itu adalah Pesantren Darunnajah (Jakarta), Pesantren Cipasung (Tasikmalaya), Pesantren Maslakul Huda Kajen (Pati), Pesantren Pabelan (Magelang), Pesantren Tebuireng (Jombang), dan Pesantren An-Nuqayah Guluk-guluk (Sumenep-Madura). Perintisan program itu dimulai dengan penyelenggaraan Latihan Tenaga Pengembangan Masyarakat (LTPM) yang melibatkan santri atau utusan dari keenam pesantren tersebut, ditambah beberapa mahasiswa/alumni perguruan tinggi (terutama IAIN). Pelatihan tersebut atas prakarsa LP3ES bekerjasama dengan Departemen Agama RI, dilaksanakan di Pesantren Pabelan (Magelang) selama enam bulan dari Oktober 1977 s.d. April 1978. Baca

Hasil konkret yang diperoleh selama pelatihan di LP3ES pada awalnya baru menghasilkan kegiatan-kegiatan rintisan berupa pembentukan kelompok Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP) di masyarakat dan di lingkungan pesantren. Namun manfaat kegiatan rintisan ini ternyata sangat dirasakan banyak warga masyarakat, sehingga muncul respon positif dari berbagai pihak, tokoh masyarakat formal maupun non formal di tingkat desa, kecamatan dan Kabupaten. Fenomena inilah yang mendorong Pesantren Maslakul Huda untuk melembagakan sekaligus meningkatkan volume serta sektor kegiatan pengembangan masyarakat yang sudah dirintis dengan membentuk wadahnya secara mandiri. Akhirnya pada tahun 1979 secara resmi dibentuk lembaga Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat - Pesantren Maslakul Huda (BPPM-PMH) yang kemudian pada tanggal 1 Oktober 1980 dibadan hukumkan dengan Akte Notaris Imam Sutarjo SH. Nomor 2, dan pada tahun 1987 disempurnakan dengan akte nomor 34 sebagai penyesuaian adanya UU Nomor 8/1985 (Undang-undang Keormasan). Keberadaan BPPM ini masuk dalam struktur hirarkis organisasi pesantren namun bersifat otonom dengan mempunyai kantor, lengkapnya administrasi, sejumlah staf dan program pengembangan tersendiri.¹³

Pembentukan lembaga BPPM Pesantren Maslakul Huda tentu saja memiliki sejumlah tujuan positif. Tujuan jangka pendeknya adalah untuk mencetak kader desa dan pesantren sebagai TPM dan *agent of social change*; menumbuhkan dan mengembangkan kelompok swadaya yang akan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan lahir maupun batin; mengembangkan pesantren sebagai pusat informasi dan pengembangan masyarakat. Sementara tujuan jangka panjangnya adalah untuk mengembangkan kreatifitas dan produktifitas masyarakat dan keluarga pesantren lewat pengembangan swadaya, swakarsa; munculnya model-model pengembangan masyarakat lewat pondok pesantren; melestarikan dialog antar pesantren dan masyarakat dalam pembangunan bangsa.

Adapun sasaran program pengembangan masyarakat yang ditangani BPPM Pesantren Maslakul Huda adalah warga masyarakat rentan (*disadvantage groups*) yang perlu mendapat perhatian, seperti mereka yang berpendapatan rendah atau mereka dari lapisan bawah yang kurang tersentuh

M.M. Billah, "Dari Paradigma Instrumentalis ke Paradigma Alternatif", dalam *Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, No. 3, Vol. V, 1988), p. 17.

¹³Erfan Maryono, "Aktualisasi Peran Kemasyarakatan Pesantren : Refleksi Pengalaman LPSM" dalam *Pesantren* No. 3/Vol. V/1988, (Jakarta: P3M, 1988), p. 31.

kegiatan pembangunan, dan berada di daerah yang masih dalam jangkauan pengaruh kiai/pesantren. Dengan demikian, kelompok sasaran program pengembangan masyarakat melalui pesantren antara lain meliputi buruh tani, petani berlahan sempit, nelayan, perajin rumah tangga, pedagang kecil, pengusaha kecil dan lain-lain.

Kelompok sasaran BPPM Maslakul Huda tidak hanya menjangkau warga masyarakat di sekitar pesantren, tetapi menjangkau luas ke berbagai desa yang jauh dari pesantren seperti wilayah kabupaten Pati, Kudus, Jepara, Purwodadi, Pemalang, memiliki jaringan hingga wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat dan bahkan pernah sampai luar Jawa. BPPM Maslakul Huda dalam mengimplementasikan program pengembangan masyarakat bersikap *inklusif* atau terbuka bagi warga masyarakat tanpa memandang agama yang dipeluknya. Dengan demikian, kelompok sasaran program BPPM tidak memandang faktor agama sebagai kriteria prioritas dalam perekutan pembentukan kelompok-kelompok swadaya masyarakat. Meskipun demikian, dalam realitasnya mayoritas kelompok sasaran program BPPM PMH adalah warga masyarakat yang beragama Islam. Oleh karenanya, BPPM tidak menutup pintu-pintu perekat di antara kelompok sasaran dalam kelompok-kelompok pengajian, jamaah tahlil dan yang semisalnya.¹⁴

Sejak berdirinya, BPPM PMH telah mengorganisir kelompok-kelompok sasaran melalui beberapa jalur. Adakalanya, dengan mengintegrasikan kelompok sasaran dalam kelompok pengajian yang sudah lama diasuh oleh pesantren, atau diasuh oleh para santri alumni pesantren Maslakul Huda yang tersebar di daerahnya masing-masing. Dengan demikian, pengelompokan ini dilakukan dengan cara memanfaatkan atau mendinamisasikan kelompok-kelompok yang sudah ada dengan memperkenalkan kegiatan baru. Adakalanya pula, dengan membentuk kelompok-kelompok baru yang didasarkan atas kesamaan jenis kegiatan dan kepentingan yang sama di antara mereka. Keberhasilan dalam membentuk dan membina kelompok-kelompok baru tersebut sangat dipengaruhi oleh dukungan positif dari tokoh-tokoh masyarakat yang bersangkutan.

Kelompok sasaran tersebut diorganisasikan, dibantu dan dibangkitkan untuk memobilisasi kekuatannya sendiri menuju kemandirian/keswadayaan melalui pendekatan-pendekatan tertentu yang dipilih BPPM misalnya melalui menempatkan para kader di wilayah-wilayah yang bersangkutan

¹⁴Hasil kajian data tertulis di kantor BPPM Maslakul Huda Kajen pada tanggal 29 Agustus 2001.

untuk melakukan pendampingan masyarakat. Kader-kader yang dipilih BPPM kebanyakan berasal dari para alumnus pesantren Maslakul Huda yang berdomisili di daerah mereka masing-masing.¹⁵ Demikian halnya dengan para pengelola / pengurus BPPM pada umumnya melibatkan para santri yang sudah selesai pendidikan (alumni) dari pesantren Maslakul Huda dan sebagian masih pula mengajar/menjadi ustadz di pesantren, ditambah beberapa orang dari masyarakat luar pesantren. Peran KH. M.A. Sahal Mahfudh dalam BPPM adalah sebagai *top leader* yang senantiasa memberikan pesan-pesan moral dan arahan-arahan yang bersifat sosial dalam rangka mengimplementasikan ajaran-ajaran pesantren “*ta’awun ‘alā al-birri wa at-taqwa*” yang dilandasi niat ibadah. Pesan-pesan KH. Sahal Mahfudh biasanya disampaikan pada saat-saat diadakannya forum-forum bagi para pengurus BPPM.

Program pengembangan masyarakat oleh pesantren, pada awalnya dilaksanakan pertama kali dengan pendekatan individual melalui kader-kadernya (disebut Tenaga Pengembangan Masyarakat /TPM) yang telah mengikuti pelatihan TPM yang diselenggarakan LP3ES di pesantren Pabelan Magelang, pada Oktober 1977 sampai dengan April 1978. Beberapa tahun kemudian program dilaksanakan dengan pendekatan kelembagaan melalui pendirian Biro Pengembangan Masyarakat (BPM) atau Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM). Baik TPM maupun Biro memainkan peranan sebagai motivator, komunikator, dinamisator, dan fasilitator terhadap kelompok sasaran.¹⁶

¹⁵Para alumni Pesantren Maslakul Huda Kajen biasanya menjadi tokoh di desanya. Mereka dapat dikategorikan sebagai *organic leader*, *native leader* atau *indigenous leader*. Sebagai pemimpin-pemimpin lokal (*indigenous leader*), mereka menjadi perwakilan sangat nyata dari warga dalam sebuah masyarakat, sehingga akan efektif jika mengajak warga memintai bantuan tokoh-tokoh lokal ini. Baca Kenny, Susan. *Developing Communities For The Future*. (Melbourne: An International Thomson Publishing Company, 1994), p. 165.

¹⁶Peranan sebagai *motivator* adalah menggali motivasi dan menumbuhkan proses kesadaran anggota kelompok sasaran akan masalah-masalah yang mereka hadapi, potensi sumber-sumber daya yang mereka miliki, serta prospek untuk memperbaiki nasib dan membangun masa depan yang lebih baik atas dasar potensi dan swadaya mereka sendiri. Peranan sebagai *komunikator* yaitu dalam pengertian : (1) dapat mengamati, merekam dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan kelompok sasaran untuk bahan perumusan kebijaksanaan dan perencanaan program yang berkaitan dengan kepentingan mereka; (2) dapat memantau dan mengawasi pelaksanaan program kelompok sasaran untuk digunakan sebagai umpan balik dalam membantu memperbaiki kekurangan dan penyimpangan yang terjadi; (3) dapat menjalin hubungan dengan dan memperoleh dukungan para kyai pemimpin pesantren dan tokoh-tokoh masyarakat; dan (4) dapat membantu melancarkan hubungan dan kerjasama antara kelompok sasaran dan LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang mem-

Kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh BPPM Maslakul Huda menggunakan metode pendekatan dari dalam (*development from within*). Dasar pemikiran tersebut mengacu pada pandangan bahwa masyarakat merupakan subyek pembangunan yang memiliki kemampuan memadai. Dengan demikian manusia dipandang sebagai sumber daya yang mampu mengembangkan dirinya dan sekaligus mampu mengatasi dan mencari alternatif pemecahan masalah dengan segala kemampuannya yang antara lain dalam membudidayaan sumber-sumber yang tersedia, baik sumber insani, alam, kelebihan waktu luang dan sebagainya. Berangkat dari sifat lembaga BPPM sebagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang berada di pesantren, maka pendekatan dari dalam/kemasyarakatan yang ditempuhnya secara umum sama dengan LSM-LSM lain plus nilai-nilai religius.

Sejumlah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilaksanakan BPPM Pesantren Maslakul Huda meliputi: pembentukan dan fungsionalisasi kelompok, konsultasi usaha, pengembangan modal dan kegiatan produktif, supervisi, pemantauan dan evaluasi.¹⁷ Keseluruhan kegiatan tersebut merupakan kesatuan sistem yang terintegrasi. Pembentukan kelompok dilakukan oleh motivator dengan cara mendatangi rumah ke rumah (*in house consulting*) untuk menginventarisir permasalahan yang ada. Masyarakat calon kelompok sasaran kemudian diarahkan untuk pertemuan, barulah berbicara tentang kelompok. Kegiatan kelompok direncanakan bersama berdasarkan permasalahan hidup yang dihadapi anggotanya serta potensi yang tersedia. Komposisi anggota selalu diusahakan 75 % terdiri dari masyarakat miskin dan 25 % kelas atasnya. Hal ini dimaksudkan agar terjadi alih tanggung jawab kelak apabila program telah berhenti yang bisa diambil alih oleh kelompok menengah dengan pola pengembangan yang ada.

Sementara penyuluhan yang dilakukan oleh motivator bertujuan untuk melakukan inventarisasi potensi dan permasalahan, penawaran gagasan

punya kepentingan dan tujuan bersama. Peranan sebagai *dinamisator* adalah terutama dalam merintis dan atau memperkenalkan strategi dan metode pengembangan masyarakat yang belum dikenal oleh lingkungan kelompok sasaran, serta inovasi di bidang teknologi dan manajemen yang memang dibutuhkan kelompok sasaran. Sedangkan peranan sebagai *fasilitator* adalah melancarkan pengadaan bantuan teknis, seperti modal kerja, peralatan, bahan baku, saluran pemasaran dan sebagainya bagi kelompok sasaran yang membutuhkannya. (Lihat, Ismid Hadad, "Menampilkan Potret Pembangunan Berwajah Swadaya Masyarakat" dalam *Prisma*, No. 4, Tahun XII, 1983, h. 18-19).

¹⁷Hasil observasi dokumen kegiatan yang ada di BPPM Pesantren Maslakul Huda 15 Agustus 2001.

baik program pengembangan ekonomi ataupun pemecahan masalah serta pemantauan (monitoring). Adapun konsultasi dalam pelaksanaannya dipisahkan menjadi dua, konsultasi perorangan dan konsultasi kelompok. Konsultasi kelompok diberikan dalam rangka memfasilitasi berfungsinya kelompok sebagai wahana kerjasama. Pertemuan kelompok biasanya diselenggarakan setengah bulan sekali yang dihadiri selain anggota dan pengurus kelompok, juga dihadiri motivator. Supervisor sering juga menghadiri pertemuan ini.

Pertemuan kelompok juga merupakan langkah persiapan jika dikaitkan dengan kegiatan lain seperti pelatihan dan kegiatan bersama. Melalui pertemuan inilah, masukan pengembangan kelompok usaha diberikan sekaligus sebagai bimbingan usaha, pengelolaan simpan pinjam di kelompok, perencanaan kegiatan bersama dan hal-hal lain yang penting dibicarakan. Pada umumnya pertemuan diselenggarakan pada malam hari pukul 20.00 s.d. 22.00 WIB, dikarenakan waktu tersebut merupakan waktu luang bagi masyarakat pedesaan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengembangkan minat dan motivasi bersama secara positif, mengembangkan kepekaan menatap sumber-sumber secara positif dan kreatif serta meningkatkan ketrampilan kelompok sasaran di bidang usaha. Caranya, secara terus menerus terjadual diberikan penyuluhan, penyelenggaraan pelatihan keusahawanan dan pelatihan ketrampilan produktif. Kegiatan ini bukan saja diikuti oleh masyarakat, tetapi diikuti juga motivator, sehingga pada tingkat penerapannya motivator akan mampu mengambil peranan yang aktif dan konsisten.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada para motivator dan kelompok sasaran dan sekaligus dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, BPPM telah menyelenggarakan berbagai pelatihan yang bersifat generalis maupun spesialis. Pelatihan-pelatihan tersebut antara lain : pelatihan dasar-dasar kewiraswastaan, pelatihan administrasi dan keuangan KSM, pelatihan managemen KSM, pelatihan peternakan unggas (ayam, itik), pelatihan perikanan (budidaya udang windu dan lele), pelatihan perencanaan usaha KSM, pelatihan managemen ruminansia (lembu, kambing), pelatihan bordir dan jahit menjahit, pelatihan teknik pengembangan desain produk barang bordir, pelatihan managemen pengelolaan permodalan KSM, pelatihan pembuatan krupuk dan cara pemasarannya, pelatihan pembuatan proposal pengajuan pinjaman modal, pelatihan usaha tani terpadu, pelatihan dan pembinaan budidaya lebah madu dan lain lain.

Dari berbagai kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang ada, banyak di antaranya telah melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan kerja dan peluang berusaha serta membangun faktor-faktor produksi sesuai dengan potensi yang ada. Modal kerja merupakan faktor produksi yang sangat vital bagi masyarakat basis. Kurangnya modal kerja menjadikan mereka tidak memiliki kesempatan bekerja dan ketergantungan mutlak kepada pemilik modal di pedesaan (*pelepas uang/ money lender*). Oleh sebab itu, pengembangan modal merupakan langkah strategis yang dilakukan kelompok. Pada umumnya modal kelompok diperoleh dari tabungan kelompok yang besarnya tergantung pada kesepakatan anggota kelompok masing-masing. Bentuk tabungan anggota kelompok ada tiga jenis; simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Bentuk-bentuk simpanan anggota yang dikembangkan adalah merupakan modal simpanan yang dikembangkan oleh koperasi. Dari koperasi inilah yang berwenang memberikan pinjaman. Besarnya pinjaman tergantung dari tingkat kelayakannya.

Dengan semakin besarnya modal swadaya ternyata mampu menggugah semangat anggota untuk menciptakan peluang berusaha. Untuk yang dikembangkan oleh kelompok sasaran sangat bervariasi walaupun dalam skala kecil dan sederhana. Modal swadaya tersebut dihimpun dari KSM-KSM. Adapun jumlah KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang berada di bawah BPPM Maslakul Huda hingga sekarang telah ada 156 KSM yang tersebar di 35 desa di wilayah Kabupaten Pati, Jepara dan Kudus. KSM-KSM tersebut melibatkan anggota masyarakat dengan berbagai jenis profesi, seperti pedagang kecil, petani, pengrajin, penjual hasil bumi (grabatan), peternak, pekerja kehutanan, tukang kayu dan bangunan dan lain-lain dengan jenis usaha kelompok antara lain : Usaha Bersama (UB) simpan pinjam, UB ayam petelur, itik, burung puyuh, sapi, kambing, lele, udang windu, konveksi, jahit/bordir, pembuatan garam briket, pembuatan krupuk, pertokoan, penyediaan sarana produksi, usaha sablon, rental komputer posyandu (pos pelayanan terpadu), sanitasi, P3A (Persatuan Petani Pemakai air) dan K2AB (Kelompok Konsumen Air Bersih).

Serangkaian program pengembangan masyarakat yang ditangani BPPM Pesantren Maslakul Huda diorientasikan pada pemecahan masalah (*problem solving*).¹⁸ Proyek-proyek BPPM ini tersebar di berbagai unit kegiatan

¹⁸Hasil Wawancara dengan Ketua BPPM Pesantren Maslakul Huda, Drs. Ahmad Wahib pada tanggal 28 Agustus 2001.

ekonomi di antaranya pengembangan holtikultura, usaha simpan pinjam, penyuluhan dan pembinaan sektor-sektor ekonomi masyarakat. Pembudidayaan holtikultura dilaksanakan di Desa Bulungan dan Gerit dengan penanaman buah rambutan. Proyek ini telah berlangsung selama enam tahun serta telah panen 2 kali. Mekanisme penanamannya adalah tanah disediakan petani setempat, sementara pihak BPPM yang menyediakan bibit rambutan dan teknik pengelolaannya.¹⁹

Untuk usaha simpan pinjam direalisasikan dengan berbagai skema kredit kepada masyarakat umum dan para santri yang dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam. Kelancaran program ini karena didukung kucuran pinjaman dana dari LP3ES, P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), BI unit PKM (Program Kredit Mikro). Adapun untuk program penyuluhan dan pembinaan mencakup berbagai unit kegiatan di antaranya penyuluhan tentang manajemen, organisasi dan teknis yang bermuara pada *income regenerating orientation* (berorientasi pada perbaikan hasil). Di antara penyuluhan yang berhasil dinikmati masyarakat adalah pembudayaan drainase atau air bersih di Desa Pancur Mayong Jepara yang telah berjalan mulai tahun 1983. Ada juga pembinaan kegiatan pra-koperasi di desa Ujung Watu, Bandung Harjo, Tulakan Kecamatan Keling Jepara dan lain-lain. Pembinaan masyarakat soal kiat-kiat memasok kacang ke Pabrik Kacang Garuda Pati, memasok pati ke Pabrik Pura Baru Tama adalah sebagian contoh sukses sebagian masyarakat berkat uluran jasa BPPM Pesantren Kajen Pati.

Pelaksanaan program pengembangan masyarakat tentunya tidak semudah yang dibayangkan. Banyak onak dan duri berupa hambatan dan tantangan yang menghadangnya. Bahkan ketika awal gagasan pengembangan masyarakat lewat BPPM Pesantren Maslakul Huda dimunculkan sempat memperoleh respon kurang enak. Semua terjadi karena tradisi dan pemikiran komunitas pesantren waktu itu belum memberikan *concern* terhadap aksi-aksi konkret pengembangan masyarakat. Sebaliknya fokus kegiatan kiai dan santri saat itu didominasi oleh aktivitas dakwah bil-lisan serta spesialisasi bidang kajian agama (*tafaqqah fid din*).

Dalam hal ini, Kyai Sahal menjelaskan, bahwa pada tahun 1984, BPPM Pesantren Maslakul Huda Pati Jawa Tengah bekerja sama dengan P3M Jakarta mengajak 12 Pesantren se-Jawa Tengah untuk melakukan aktifitas

¹⁹Wawancara dengan Ali Sofwan (Wakil Ketua BPPM) dan Hartono (Sekjen BPPM), (Kajen-Pati, 17 September 2000).

pengembangan masyarakat. Ternyata, 3 dari 12 pesantren itu (25 %) tidak dapat menerima kegiatan itu dengan alasan yang tidak sama. Namun pada dasarnya, mereka tidak dapat menerima kegiatan pengembangan masyarakat apabila dilakukan oleh pesantren.¹⁹

Kebanyakan, mereka tidak dapat melakukan kegiatan pengembangan masyarakat tersebut masih di seputar alasan, bahwa misi pesantren adalah *tafaqquh fiddin*²⁰. Mereka khawatir sebagian pesantren akan menerima efek negatif yang ditimbulkan oleh program itu. Dikembangkannya ketrampilan di pesantren menyebabkan masuknya tenaga-tenaga pengelola yang umumnya memperoleh pendidikan di perguruan tinggi luar pesantren, lalu timbul kekhawatiran akan tergesernya kekuasaan kyai. Kekhawatiran yang sering muncul pula adalah tergesernya kedudukan pesantren dari lembaga keagamaan dan pendidikan ke lembaga swadaya masyarakat. Bahkan ada yang mempertanyakan, pesantren yang mengembangkan program itu apakah masih tepat disebut pesantren.

Respon kurang baik itu bisa terjadi karena belum lengkapnya informasi yang mereka terima tentang apa dan bagaimana pengembangan masyarakat serta mengapa diperlukan upaya pengembangan masyarakat oleh pesantren di samping belum banyaknya contoh konkret wujud pesantren yang melakukan pengembangan masyarakat. Selain itu, dilihat dari elemen-elemen pokok pesantren, maka usaha mewujudkan fungsi sosial lembaga keagamaan tidak perlu menimbulkan kekhawatiran. Masjid, pondok, pengajian kitab klasik, santri dan kyai tidaklah kehilangan fungsinya, tetapi bahkan menunjang usaha penggabungan antara pengetahuan agama dan pendidikan ketrampilan secara serasi dan realisasinya dalam kehidupan sosial.

Namun lambat laun, pendangan kurang positif terhadap eksistensi BPPM Pesantren Maslakul Huda mulai menghilang seiring dengan performance nyata yang ditawarkan lembaga ini dalam ikut memberdayakan umat. Bahkan kalangan pesantren kini telah beranggapan bahwa gagasan pengembangan masyarakat merupakan sebuah respon Kiai Sahal dan koleganya saat itu dalam membaca ketimpangan lingkungannya. Dapat dikatakan, Kiai Sahal dan kawan-kawan telah mengakomodir tuntutan sistematisasi *dakwah bil-lisanil hal* secara brilian berinisiatif mentransformasi sebagian peran sosio-kultural sebagai LSM/LPSM "lokal" lewat BPPM.

¹⁹MA. Sahal Mahfudz, *Pesantren Mencari Makna*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), p. 13.

²⁰*Ibid.*

Dalam perspektif lain, Pesantren Maslakul Huda menerapkan terobosan visi dan aksi yang dikenal dengan *kanalisasi*. Menurut Kyai Sahal Mahfudz, *kanalisasi* artinya terlibat namun tidak hanyut.²¹ Sebagai *kanal* maka pesantren pada prinsipnya menjalankan fungsi keperantaraan. Karena di dalam *kanal* memiliki arus (kekuatan) maka dengannya bisa dilakukan berbagai bentuk terobosan dan pendobrakan, sehingga kiprah pesantren tidak melulu di bidang *taffaqah fid-din* namun ikut terlibat secara aktif dalam menangani aksi-aksi pengembangan kehidupan masyarakat secara sistematis dan terorganisir. Keterlibatan BPPM Pesantren Maslakul Huda Pati dalam ikut serta mengembangkan masyarakat dalam perkembangannya telah membawa beberapa hasil positif sehingga lama kelamaan mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi dari berbagai pihak.

IV. Simpulan

Program pengembangan masyarakat seperti yang dilakukan BPPM Pesantren Maslakul Huda cukup berhasil dalam menumbuhkan semangat kemandirian warga untuk mengatasi permasalahan hidupnya. Meskipun demikian LSM Dian Desa ke depan masih perlu mengorientasikan program-programnya pada upaya jelas-jelas memberdayakan masyarakat. Peran-peran transformatif dalam ikut memikirkan upaya menangani kemiskinan, pengangguran, kesenjangan kelompok kaya dan miskin serta kesenjangan kehidupan kota dan desa serta komitmen kemanusiaan lainnya perlu diperkaya dan diperluas.

Hendaknya program pengembangan masyarakat yang dilakukan BPPM Pesantren Maslakul Huda di masa mendatang diarahkan untuk mengatasi berbagai problem kerusakan lingkungan di Daerah Kajen dan sekitarnya. Persoalan kerusakan lingkungan di daerah tersebut antara lain semakin merosotnya kualitas air kali Code akibat limbah industri tapioka dan rumah tangga, asap knalpot kendaraan bermotor yang melebihi ambang batas, kerusakan kawasan Hutan akibat praktik penebangan liar dan lain-lain. Jika memungkinkan BPPM Pesantren Maslakul Huda juga melakukan advokasi terhadap hak-hak ekologis warga yang sering kali di eksplorasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

²¹Purwo Santoso, "Kiprah Pesantren Dalam Transformasi; Catatan dari Maslakul Huda" dalam *Pesanten*, (Jakarta, P3M, No. 3/Vol. V/1988), p. 85.

DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi Azra, 1998, *Jaringan Ullama*, Mizan: Bandung, Cet. IV.
- Ahmad Baso, 1997, "Melawan Tekanan Agama: Wacana Baru Pemikiran Fiqih NU" dalam *Wacana Baru Fiqih Sosial 70 Tahun KH. Ali Yafie*, Bandung: Mizan.
- Clarke, Gerard, 1996, "NGOs and Politics in The Developing World", *Papers in International Development*, No. 20, Centre For Development Studies, University of Wales Swansea.
- Mansour Fakih, 1996, *The Role of Non-governmental Organizations in Social Transformation : A Participatory Inquiry in Indonesia*, Terj. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial*,: *Pergolakan Ideologi di Dunia LSM Indonesia*, Oleh. Muhammad Miftahuddin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rustam Efendi (Ed.), 1997, *Agenda LSM Menyongsong Tahun 2000*, Jakarta: Cesda-LP3ES.
- Ife, Jim, 1997, *Community Development*, Melbourne: Addison Wesley Longman.
- Kenny, Susan, 1994, *Developing Communities For The Future*, Melbourne: An International Thomson Publishing Company.
- Erfan Maryono, 1998, "Aktualisasi Peran Kemasyarakatan Pesantren : Refleksi Pengalaman LPSM" dalam *Pesantren No. 3/Vol. V/1988*, Jakarta: P3M.
- Nurcholish Madjid, 1997, *Bilik- Bilik Pesantren*, Jakarta: Paramadina.
- _____, 1989, "Aktualisasi Ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Islam Indonesia: Menatap Masa Depan, Jakarta: P3M.
- KHMA Sahal Mahfudh, 1979, "Membangun Harus dari Bawah", dalam *Prisma No. 3 Maret 1979, Tahun VIII*, Jakarta: LP3ES.
- _____, 1999, *Pesantren Mencari Makna*, Jakarta: Pustaka Ciganjur.
- _____, 2001, "Apa itu Zuhud", dalam *Duta Masyarakat 15 Juni 2001*, Surabaya: Jagat Media Utama.
- _____, 1994, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKIS.
- _____, 1999, "Pesantren Menghadapi Modernisasi" dalam *Suara Merdeka 30 Agustus 1999*, Semarang.
- Open , Manfred dan Wolfgang Karcher, 1988, *Dinamika Pesantren*, Jakarta: P3M.
- M. Dawam Rahardjo, 1988, *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3ES, Cet. IV.

- M. Dawam Rahardjo, 1985, *Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun Dari Bawa*, Jakarta: P3M.
- Purwo Santoso, 1988, "Kiprah Pesantren Dalam Transformasi : Catatan dari Maslakul Huda" dalam *Pesanten* No. 3/Vol. V/1988, Jakarta: P3M.
- RHA. Soenarjo, 1971, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI.
- Open, Manfred dan Wolfgang Karcher, 1988, *Dinamika Pesantren*, Jakarta: P3M.
- Yacub, HM, 1985, *Pondok Pesantren dan Pembangunan Masyarakat Desa*, Bandung: Angkasa.

